



ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

2022-2026

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Tahun 2022–2026 disusun sebagai pedoman pengembangan PkM berbasis keilmuan Hukum Tata Negara, selaras dengan Roadmap PkM FSEI dan Roadmap PkM LPPM IAIN Curup.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan program kerja tahunan, pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa, pengembangan kemitraan, luaran dan outcome, serta penyediaan bukti kinerja untuk SPMI,

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara	Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.		9 Juni 2022
Dekan FSEI	Dr. Yusefri, M.,Ag		9 Juni 2022
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Busman Edyard., M.Ag		9 Juni 2022
Ketua LPPM IAIN Curup	Prof. Dr. Murni Yanto., M.Pd		9 Juni 2022

**Mengetahui,
REKTOR IAIN CURUP**



Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I
NIP. 197504152005011009

KEPUTUSAN DEKAN FSEI IAIN CURUP

NOMOR: 134 /In.34/FS/OT.00/ 09/2022

TENTANG

PENETAPAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA TAHUN 2024–2029

Menimbang :

- a. bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan perlu dikembangkan sesuai bidang keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara;
- b. bahwa Roadmap PkM FSEI IAIN Curup merupakan acuan fakultas dan perlu diturunkan menjadi roadmap program studi;
- c. bahwa diperlukan arah PkM yang terukur, berkelanjutan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung peningkatan mutu serta akreditasi program studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Roadmap PkM Program Studi Hukum Tata Negara Tahun 2024–2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
6. KMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti;
8. Roadmap PkM LPPM IAIN Curup Tahun 2024–2029;
9. Roadmap PkM FSEI IAIN Curup Tahun 2024–2029;
10. SK Rektor IAIN Curup Nomor 0460/In.34/R/PP.00.9/09/2021 tentang Standar Mutu PkM.

Memperhatikan :

Dokumen SPMI, AMI, Pedoman PkM, kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan Prodi Hukum Tata Negara, serta dokumen akademik dan kemitraan program studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FSEI IAIN CURUP TAHUN 2024–2029.

KESATU :

Roadmap menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu PkM Program Studi Hukum Tata Negara.

KEDUA : Setiap PkM diarahkan selaras dengan bidang keilmuan HTN, kebutuhan masyarakat, roadmap fakultas, serta visi dan misi program studi.

KETIGA : Pelaksanaan dilakukan bertahap melalui penguatan tata kelola, kapasitas SDM, kemitraan, luaran, outcome, hilirisasi, dan keberlanjutan.

KEEMPAT : Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun dan menjadi dasar perbaikan program serta rencana kerja tahun berikutnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 15 Juni 2022

DEKAN FSEI IAIN CURUP



Dr. Yusefri., M.Ag

KATA SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas tersusunnya Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Tahun 2024–2029. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari roadmap PkM fakultas dan institusi, dengan fokus pada kontribusi keilmuan Hukum Tata Negara kepada masyarakat.

Program Studi Hukum Tata Negara memiliki fokus keilmuan pada ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai keislaman. Visi program studi adalah menjadi program studi yang bermutu dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara berbasis Islam Moderasi di tingkat Asia Tenggara 2045. Arah tersebut menjadi dasar pemilihan tema PkM dalam roadmap ini.

Roadmap memprioritaskan literasi konstitusi, kesadaran hukum, tata kelola pemerintahan dan desa, kebijakan publik, pembentukan peraturan, pemilu dan demokrasi, pelayanan publik, pendampingan masyarakat, serta penguatan moderasi Islam dalam kehidupan ketatanegaraan.

Dokumen ini juga dirancang untuk memastikan kegiatan PkM tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan luaran dan outcome yang dapat diverifikasi, seperti modul, policy brief, publikasi, model pendampingan, rekomendasi kebijakan, serta perubahan kapasitas mitra.

Kami mengharapkan roadmap ini menjadi pedoman kerja bersama bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra pemerintah, lembaga hukum, organisasi profesi, dan masyarakat. Evaluasi tahunan perlu dilakukan secara konsisten agar target dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan nyata.

Curup, 15 Juni 2022

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA



Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DRAFT KEPUTUSAN DEKAN.....	3
KATA SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI	5
DAFTAR TABEL.....	6
1. PENDAHULUAN	8
2. PROFIL DAN IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	8
3. LANDASAN PENYUSUNAN.....	8
4. VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH PkM	8
5. ANALISIS KEBUTUHAN DAN SWOT.....	9
6. BIDANG UNGGULAN DAN TEMA PkM HTN	10
7. SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS	10
8. MATRIKS PROGRAM PkM 2024–2029	10
9. KETERLIBATAN DOSEN DAN MAHASISWA.....	11
10. KEMITRAAN DAN JEJARING.....	11
11. LUARAN, OUTCOME DAN HILIRISASI.....	11
12. IKU DAN IKT	12
13. TARGET 2024–2029.....	12
14. TAHAPAN ROADMAP.....	12
15. MONITORING, EVALUASI DAN PPEPP	13
16. PENUTUP.....	13
LAMPIRAN.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil dan Karakteristik Keilmuan HTN.....

Tabel 2. Analisis SWOT PkM HTN

Tabel 3. Bidang Unggulan dan Tema PkM.....

Tabel 4. Matriks Program Tahunan 2024–2029

Tabel 5. Kemitraan Prioritas

Tabel 6. IKU dan IKT

Tabel 7. Target IKU/IKT 2024–2029

Tabel 8. Tahapan Roadmap

Tabel 9. Matriks Monitoring dan Evaluasi

Catatan: nomor halaman dapat diperbarui otomatis setelah finalisasi tata letak oleh pengelola dokumen.

1. PENDAHULUAN

Roadmap PkM Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) FSEI IAIN Curup Tahun 2024–2029 merupakan turunan langsung dari Roadmap PkM FSEI IAIN Curup Tahun 2024–2029. Pada tingkat program studi, roadmap diarahkan agar PkM dosen dan mahasiswa memiliki keterkaitan yang jelas dengan bidang keilmuan HTN, kebutuhan masyarakat, kemitraan, luaran, outcome, dan keberlanjutan.

Roadmap institusi menetapkan bahwa roadmap fakultas dan program studi menjadi acuan pelaksanaan PkM sesuai bidang keilmuan, dengan perhatian pada kompetensi dosen, pendanaan, sarana, luaran publikasi/HKI, dan manfaat bagi masyarakat.

2. PROFIL DAN IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program Studi Hukum Tata Negara FSEI IAIN Curup berfokus pada pengkajian dan pengembangan ilmu hukum di bidang ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai keislaman. Program studi menyatakan komitmen menghasilkan lulusan profesional, berintegritas, dan mampu menjawab persoalan hukum melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen	Uraian
Nama	Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi	IAIN Curup
Visi	Menjadi Program Studi yang bermutu dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara berbasis Islam Moderasi di tingkat Asia Tenggara 2045.
Misi PkM	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
Status akreditasi	Baik (sesuai laman resmi FSEI yang diakses saat penyusunan dokumen).
Basis keilmuan	Konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, ketatanegaraan, hukum administrasi, pemerintah daerah, kebijakan publik, perundang-undangan, pemilu, siyasah, dan bidang terkait.

3. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan utama mengikuti roadmap PkM FSEI dan LPPM IAIN Curup, termasuk regulasi pendidikan tinggi, Statuta IAIN Curup, SN-Dikti, standar mutu PkM, SPMI/AMI, serta dokumen akademik Program Studi Hukum Tata Negara.

Program studi juga memiliki dokumen Pedoman, AMI, dan SPMI yang ditampilkan pada laman dokumen FSEI untuk mendukung kebutuhan akreditasi.

4. VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH PkM

4.1 Visi PkM Prodi

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu Hukum Tata Negara melalui Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, berbasis Islam moderasi, berorientasi pada penyelesaian masalah ketatanegaraan, dan berdampak bagi masyarakat.

4.2 Misi PkM Prodi

- mengembangkan PkM berdasarkan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan kebutuhan masyarakat;
- menguatkan literasi konstitusi, hukum, demokrasi, kebijakan publik, pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan;
- mengintegrasikan nilai Islam moderasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kewargaan;
- meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM berbasis pembelajaran dan pengalaman lapangan;
- menghasilkan publikasi, modul, policy brief, HKI, model pendampingan, dan luaran lain yang dapat dimanfaatkan mitra.

4.3 Tujuan

- tersedianya PkM tahunan yang konsisten dengan roadmap dan Renop prodi;
- meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa;
- meningkatnya kualitas luaran dan outcome;
- terbentuknya kemitraan aktif dengan pemerintah, lembaga hukum, organisasi profesi, sekolah/pesantren, desa/kelurahan, dan komunitas;
- tersedianya bukti kinerja yang kuat untuk SPMI, AMI dan akreditasi.

5. ANALISIS KEBUTUHAN DAN SWOT

Aspek	Analisis Tingkat Prodi
Strengths	Basis keilmuan HTN jelas; kurikulum mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Pemerintah Daerah, Perundang-undangan, Kebijakan Publik, Pemilu dan Partai Politik, PTUN, dan Fiqh Siyasah; tersedia dosen dengan latar keilmuan hukum; sudah ada jejaring kerja sama.
Weaknesses	Dokumentasi outcome perlu distandarkan; luaran PkM perlu lebih konsisten; keterkaitan PkM dengan roadmap prodi perlu diperkuat;

Aspek	Analisis Tingkat Prodi
	sebagian kegiatan berpotensi masih berbasis event.
Opportunities	Kebutuhan literasi hukum dan konstitusi; tata kelola desa; pelayanan publik; kebijakan publik; pemilu/demokrasi; pendampingan komunitas; kerja sama pemerintah dan organisasi profesi.
Threats	Perubahan regulasi; isu hukum-politik yang sensitif; keterbatasan keberlanjutan program; tuntutan bukti outcome yang semakin kuat dalam akreditasi.

Kurikulum resmi yang ditampilkan FSEI menunjukkan mata kuliah inti yang dapat menjadi sumber tema PkM, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Pemerintah Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Kebijakan Publik, Hukum Pemilu dan Partai Politik, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan bidang siyasah.

6. BIDANG UNGGULAN DAN TEMA PkM HTN

No	Bidang	Tema Prioritas
1	Konstitusi dan literasi hukum	Pendidikan konstitusi; hak dan kewajiban warga; kesadaran hukum; bantuan informasi hukum.
2	Pemerintahan desa/daerah	Tata kelola pemerintahan; transparansi; partisipasi publik; penyusunan kebijakan; pengawasan masyarakat.
3	Peraturan dan kebijakan publik	Literasi pembentukan peraturan; policy brief; konsultasi regulasi sederhana; analisis kebijakan berbasis masalah.
4	Demokrasi, pemilu dan partisipasi	Literasi pemilu; anti-hoaks; pendidikan demokrasi; partisipasi pemilihan; etika politik.
5	Pelayanan publik dan masyarakat	Hak masyarakat atas pelayanan; mekanisme pengaduan; standar pelayanan; akses keadilan.
6	Moderasi Islam dan ketatanegaraan	Moderasi beragama; toleransi; kewargaan

No	Bidang	Tema Prioritas
		inklusif; pencegahan konflik sosial.
7	Digital governance	Literasi hukum digital; pelayanan publik digital; keamanan/kecakapan informasi; dokumentasi kebijakan.
8	Pemberdayaan kelompok rentan	Literasi hukum bagi perempuan, pemuda, masyarakat desa, kelompok marginal dan komunitas pendidikan.

7. SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS

Sasaran	Program	Luaran
Tata kelola	Roadmap, SOP, database, forum evaluasi tahunan	Dokumen, SK, database, berita acara
Dosen	PkM sesuai bidang, pelatihan outcome/publikasi	Proposal, laporan, publikasi
Mahasiswa	PkM dosen-mahasiswa, kelompok PkM, edukasi masyarakat	Logbook, laporan, modul
Mitra	Program bersama pemerintah/organisasi profesi/komunitas	MoA/SPK, kegiatan, outcome
Luaran	Modul, policy brief, publikasi, HKI, model pendampingan	Dokumen luaran terverifikasi
Dampak	Program berkelanjutan/replikasi	Bukti adopsi, perubahan, tindak lanjut

8. MATRIKS PROGRAM PkM 2024–2029

Tahun	Fokus Utama	Milestone
2022	Pemetaan masalah hukum dan kebutuhan masyarakat; baseline mitra; literasi konstitusi/hukum dasar	Minimal 2 program prioritas; 2 mitra; baseline terdokumentasi
2023	Penguatan kapasitas desa/kelurahan dan	3 program; 3 mitra; minimal 1 modul

Tahun	Fokus Utama	Milestone
	komunitas; pelayanan publik; literasi regulasi	
2024	Integrasi PkM dosen-mahasiswa; demokrasi/pemilu; kebijakan publik; digital governance	4 program; $\geq 40\%$ melibatkan mahasiswa; 2 luaran
2025	Hilirisasi model pendampingan; policy brief; penguatan kelompok binaan	5 program; $\geq 50\%$ melibatkan mahasiswa; ≥ 3 luaran
2026	Replikasi model dan perluasan jejaring regional/nasional	6 program; ≥ 4 mitra aktif; ≥ 2 program berlanjut
2027	Establish: model unggulan, keberlanjutan, publikasi dan bukti dampak	≥ 6 program; ≥ 5 mitra aktif; $\geq 60\%$ program prioritas punya outcome

9. KETERLIBATAN DOSEN DAN MAHASISWA

Kegiatan PkM diarahkan pada pembentukan tim yang mengintegrasikan dosen dan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa harus memiliki tugas yang jelas, bukti aktivitas, dan refleksi/pembelajaran. PkM dosen dapat menjadi wahana implementasi pengetahuan dari mata kuliah yang relevan, termasuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Kebijakan Publik, Pemilu dan Partai Politik, serta mata kuliah terkait siyasah.

10. KEMITRAAN DAN JEJARING

Prioritas Mitra	Bentuk Kegiatan	Target
Pemerintah desa/kelurahan	Tata kelola, regulasi, pelayanan, literasi hukum	≥ 2 mitra aktif/tahun secara bertahap
Pemerintah daerah	Kebijakan publik, pelayanan, edukasi hukum	≥ 1 kegiatan kolaboratif/tahun mulai 2026
KPU/lembaga terkait pemilu	Literasi demokrasi dan pemilu	≥ 1 program/2 tahun
Pengadilan/LBH/organisasi profesi	Literasi hukum dan pendampingan	≥ 1 program/tahun
Sekolah/pesantren/komunitas	Konstitusi, moderasi, kewargaan	≥ 2 kegiatan/tahun
Prodi HTN perguruan tinggi lain	Seminar, PkM kolaboratif, benchmarking	≥ 1 kegiatan kolaboratif/tahun mulai 2026

Saat penyusunan dokumen, laman resmi FSEI mencantumkan jejaring/kerja sama HTN dengan antara lain IKADIN DPC Bengkulu, Pengadilan Agama Curup, KPU Rejang Lebong, LBH Narendradhipa

Rejang Lebong, APHUTARI, serta sejumlah Program Studi HTN perguruan tinggi lain. Pada Juli 2026, HTN FSEI juga mengumumkan penandatanganan MoA dengan IKADIN DPC Bengkulu.

11. LUARAN, OUTCOME DAN HILIRISASI

Level	Target
Output	Laporan, dokumentasi, modul, policy brief, publikasi, HKI, media edukasi, rekomendasi.
Outcome jangka pendek	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, kepatuhan, kapasitas tata kelola, atau kualitas pelayanan mitra.
Outcome menengah	Model diterapkan ulang; mitra mengadopsi rekomendasi; program berlanjut; terjadi perubahan praktik.
Hilirisasi	Model pendampingan/edukasi digunakan mitra; modul digunakan; rekomendasi menjadi bahan kebijakan atau SOP sederhana.
Bukti	Baseline-endline, daftar hadir, pre/post test bila relevan, surat adopsi, testimoni, data perubahan, berita kegiatan, publikasi.

12. IKU DAN IKT

Kode	Indikator	Satuan	Target 2029
IKU-1	PkM dosen tetap sesuai bidang keilmuan HTN	% DTPS	≥70% pada 2029
IKU-2	PkM dosen melibatkan mahasiswa	% kegiatan	≥50% pada 2029
IKU-3	Kegiatan PkM memiliki luaran terverifikasi	% kegiatan	≥80% pada 2029
IKU-4	Publikasi PkM terverifikasi	jumlah/tahun	≥5 pada 2029
IKU-5	Mitra aktif yang menghasilkan kegiatan	kumulatif	≥8 pada 2029
IKU-6	Program prioritas memiliki outcome terukur	% program	≥60% pada 2029
IKU-7	Kelengkapan dokumen PkM	% kegiatan	≥95% pada 2029

Kode	Indikator	Satuan	Target 2029
IKT-1	Modul/policy brief/HKI/model PkM	kumulatif	≥ 8
IKT-2	Program lintas prodi/fakultas	jumlah/tahun	≥ 1
IKT-3	Model PkM diadopsi mitra	kumulatif	≥ 3
IKT-4	Program PkM berulang/replikasi	kumulatif	≥ 3
IKT-5	PkM menjadi bahan ajar/studi kasus	kumulatif	≥ 4

13. TARGET 2022–2027

No	Indikator	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	PkM dosen sesuai bidang HTN	% DTPS	40	45	50	58	65	70
2	PkM melibatkan mahasiswa	% kegiatan	25	30	35	40	50	50
3	Kegiatan dengan luaran terverifikasi	%	45	50	60	65	75	80
4	Publikasi PkM	jumlah	1	2	2	3	4	5
5	Program pemberdayaan/pendampingan	jumlah	2	3	3	4	5	6
6	Mitra aktif	kumulatif	2	3	4	5	7	8
7	Modul/policy brief/HKI/model	kumulatif	1	2	3	4	6	8
8	Program dengan outcome terukur	% prioritas	15	20	30	40	50	60
9	Kelengkapan bukti kegiatan	%	75	80	85	90	95	95

14. TAHAPAN ROADMAP

Tahap	Tahun	Fokus	Hasil Utama
Fondasi	2022	Baseline, masalah, database, unggulan	peta SOP, tema Sistem dan baseline tersedia

Tahap	Tahun	Fokus	Hasil Utama
Penguatan	2023	Kapasitas dosen/mahasiswa dan kemitraan	Program lebih konsisten
Integrasi	2024	Dosen-mahasiswa, lintas tema, outcome	Program terintegrasi
Hilirisasi	2025	Model, modul, policy brief, adopsi	Luaran dimanfaatkan
Replikasi	2026	Perluasan dan pengulangan program	Jejaring dan model berkembang
Establish	2027	Keberlanjutan dan bukti dampak	Model unggulan berkelanjutan

15. MONITORING, EVALUASI DAN PPEPP

Tahap	Waktu	Indikator	Bukti
Perencanaan	Awal tahun	Kesesuaian roadmap, mitra, tim, anggaran	Proposal/review
Monitoring	Tengah kegiatan	Keterlaksanaan dan risiko	Form monitoring, dokumentasi
Evaluasi output	Akhir kegiatan	Luaran dan kelengkapan bukti	Checklist, laporan
Evaluasi outcome	3–12 bulan	Pemanfaatan/adopsi/perubahan	Baseline-endline, wawancara, surat adopsi
RTM/rapat prodi	Akhir tahun	Capaian IKU/IKT dan gap	Notulen, RTL
Peningkatan	Tahun berikutnya	Tindak lanjut hasil evaluasi	Rencana program berikutnya

16. PENUTUP

Roadmap PkM Program Studi Hukum Tata Negara FSEI IAIN Curup Tahun 2022–2027 menjadi pedoman operasional pengembangan PkM berbasis keilmuan HTN. Keberhasilan roadmap tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari keselarasan dengan bidang keilmuan, keterlibatan mahasiswa, kualitas mitra, luaran terverifikasi, outcome, adopsi, dan keberlanjutan.

Roadmap ini ditinjau sekurang-kurangnya setiap tahun dan dapat disesuaikan melalui mekanisme penjaminan mutu berdasarkan capaian aktual, evaluasi, perubahan kebutuhan masyarakat, kebijakan institusi, dan kapasitas sumber daya.

LAMPIRAN 1. FORMAT MINIMAL BUKTI KINERJA

- SK/surat tugas tim

- b. Proposal dan hasil review
- c. Bukti kemitraan
- d. Daftar dosen/mahasiswa
- e. Logbook
- f. Daftar hadir dan dokumentasi
- g. Laporan akhir
- h. Luaran publikasi/modul/policy brief/HKI/model
- i. Instrumen baseline-endline bila relevan
- j. Evaluasi mitra
- k. Bukti adopsi/tindak lanjut/replikasi

LAMPIRAN 2. MATRIKS KETERKAITAN KEILMUAN–PkM

Bidang Mata Kuliah/Keilmuan	Tema PkM	Mitra	Luaran
Hukum Tata Negara & Hukum Konstitusi	Literasi konstitusi dan hak warga	Sekolah/desa/komunitas	Modul, edukasi, publikasi
Hukum Administrasi Negara & Pemerintah Daerah	Pelayanan publik dan tata kelola	Desa/pemda	Pendampingan, rekomendasi
Ilmu Perundang-undangan	Literasi regulasi dan penyusunan kebijakan	Desa/komunitas	Policy brief/modul
Kebijakan Publik	Analisis masalah dan evaluasi kebijakan	Pemda/masyarakat	Policy brief
Hukum Pemilu & Partai Politik	Pendidikan demokrasi dan pemilu	Pemilih pemula/komunitas	Modul/literasi
PTUN	Literasi hak administratif	Masyarakat/lembaga	Edukasi dan panduan
Fiqh Siyasah & Moderasi	Ketatanegaraan dan moderasi Islam	Pesantren/komunitas	Modul/dialog

LAMPIRAN 3. CATATAN DOKUMEN

Nomor SK, tanggal penetapan, nama pejabat, NIP, baseline kuantitatif 2024, dan data capaian aktual harus diisi berdasarkan dokumen resmi program studi/fakultas. Dokumen ini tidak mengarang data yang belum diverifikasi.

Informasi profil, visi-misi, kurikulum, status akreditasi, dosen, serta daftar dokumen/kemitraan yang dirujuk dalam penyusunan ini berasal dari laman resmi FSEI dan perlu diperbarui jika laman resmi berubah.